

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan suatu wilayah/kota berdampak pada perubahan sosial, ekonomi, geografi, lingkungan dan budaya sehingga diperlukan fasilitas penunjang untuk melayani kebutuhan tersebut dan mendukung laju pertumbuhan di berbagai sektor. Indikator peningkatan pembangunan suatu wilayah/kota terlihat dari sistem fasilitas prafasilitasnya yang terpadu (integrated). Sistem fasilitas yang sistematis dan terpadu menjadi bagian struktur ruang yang berfungsi sebagai jaringan penghubung dan roda kegiatan dalam penataan ruang. Kemampuan fasilitas sosial melayani penduduk terlihat dari segi kuantitas dan kualitas dengan parameter jumlah fasilitasnya, kemudahan pencapaian, waktu tempuh dan jarak wilayah layanan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah/kota.

Fasilitas sosial merupakan suatu tempat penunjang dan kebutuhan utama yang dibutuhkan dalam kelangsungan hidup sehari-hari di sebuah wilayah tertentu. Pembangunan fasilitas sosial seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, juga perdagangan dan jasa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya serta kesatuan dan persatuan bangsa terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi antara kelompok serta masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antar wilayah/kota.

Perkembangan suatu wilayah/kota hendaknya diikuti oleh ketersediaan yang lengkap dan dapat melayani kebutuhan masyarakat setempat, sehingga perlu dilihat ketersediaan dan pelayanan fasilitas sosial tersebut. Dalam perkembangan suatu wilayah/kota, fasilitas memang memiliki peran penting yang dapat menunjukkan apakah suatu wilayah/kota tersebut dapat dikatakan baik atau buruk dilihat dari ketersediaan fasilitasnya yang lengkap sehingga dengan demikian secara berkesinambungan pemerintah berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas yang ada, hal ini juga disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya yang ada pada

wilayah/kota tersebut, sehingga ketersediaan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah dapat dirasakan pelayanannya oleh masyarakat.

Pemerintah Daerah Kota mempunyai kewajiban menyediakan fasilitas sosial untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk sebagai tujuan pembangunan wilayah/kota. Kebijakan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah berdampak kepada diberikannya kewenangan setiap daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan. Implementasi dari kebijakan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengembangkan potensi daerah dengan menyediakan fasilitas wilayah/kota.

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu wilayah di Propinsi Jawa barat yang memiliki tingkat perkembangan yang cukup pesat. Kondisi ini mengindikasikan deliniasi kawasan perkotaan akan mengalami perubahan secara mendasar terutama pertumbuhan penduduk.

Munculnya kota-kota tersebut diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan terhadap kawasan-kawasan sentra produksi disekitarnya, sehingga distribusi pelayanan fasilitas sosial perkotaan dapat terpusat dan tidak lagi menjadi beban bagi kota / kabupaten dan kota kecamatan induk. Akan tetapi untuk mengendalikan pembangunan kota-kota tersebut dan agar tidak lagi mengalami perubahan pemanfaatan lahan secara berlebihan yang dapat merusak fungsi lahan pertanian, maka diperlukan adanya batasan fungsi kota sebagai pusat pelayanan terhadap wilayah kecamatan masing-masing.

Perkotaan Palabuhanratu merupakan salah satu wilayah Kecamatan di Kabupaten Sukabumi yang terletak pada ketinggian dari permukaan laut 0 - 500 % mdpl.

Bentangan wilayah Perkotaan Palabuhanratu meliputi daratan seluas 91,86 Ha dan mencakup 6 Desa/Kelurahan dengan pusat aktifitas sebagai Perkotaan. Dengan demikian Perkotaan Kabupaten Sukabumi memiliki fungsi dan peran sebagai pusat

pelayanan terhadap seluruh wilayah yang ada di sukabumi Selatan. Untuk memberi peran yang optimal sebagai kawasan perkotaan dan sebagai pusat pelayanan maka perlu untuk mengkaji jenis dan jumlah fasilitas sosial perkotaan yang dibutuhkan berdasarkan fungsi kota dan kebutuhan penduduk di dalamnya dan penduduk dari daerah hinterlandnya. Kecamatan Palabuhanratu sebagai Kawasan Perkotaan Kabupaten Sukabumi agar lebih maksimal pelayanannya.

Selain itu letak Perkotaan Palabuhanratu yang strategis yang merupakan simpul dari Perkotaan yang ada di daerah sukabumi selatan, oleh karena itu sangat perlu adanya peningkatan fasilitas sosial yang mencirikan perkotaan dengan fungsinya sebagai pusat pelayanan. Pada dasarnya fungsi perkotaan terdiri atas dua fungsi dasar, yaitu sebagai pusat pelayanan terhadap penduduk seluruh wilayah Kabupaten (fungsi primer) dan sebagai pusat pelayanan lokal terhadap penduduk kota itu sendiri (fungsi komplementer).

Sesuai RTRW Propinsi Jawa Barat, penerapan Kawasan Perkotaan Palabuhanratu meliputi PKNp yaitu sebagai berikut :

- PKNp terdiri atas Kota Palabuhanratu, Perikanan Samudera dan potensi perikanan yang akan dikembangkan dengan dukungan pembangunan pusat bisnis kelautan skala pelayanan nasional dan internasional.

Sesuai RTRW Kabupaten Sukabumi, penerapan Kawasan Perkotaan Palabuhanratu meliputi PKW yaitu sebagai berikut :

- PKW terdiri atas Perkotaan Palabuhanratu, sehubungan Perkotaan Palabuhanratu selain sebagai Ibukota Kabupaten Sukabumi juga sebagai pusat kegiatan, permukiman, pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, perdagangan dan pariwisata.

Kawasan Perkotaan Palabuhanratu untuk melayani kegiatan skala beberapa kabupaten/kota. Secara lebih jelas, di Kawasan Perkotaan Palabuhanratu fasilitas minimum yang tersedia sebagai Perkotaan atau PKW adalah:

- a. Perhubungan : pelabuhan udara (sekunder), dan atau pelabuhan laut (pengumpan), dan atau terminal tipe B
- b. Ekonomi : pasar induk regional
- c. Kesehatan : rumah sakit umum tipe B
- d. Pendidikan : perguruan tinggi

Terkait dengan hal itu kajian penelitian yang dilakukan untuk dapat memberi penegasan fungsi sebagai Perkotaan dalam bentuk penulisan dengan judul “ *Identifikasi Kualitas dan Tingkat Pelayanan Fasilitas Sosial di Kawasan Perkotaan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.* ”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Ketersediaan fasilitas sosial yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan di Kawasan Perkotaan Kabupaten Sukabumi menjadi faktor penting, seiring dengan perkembangan jumlah penduduk pada setiap tahunnya, jumlah penduduk yang semakin bertambah setiap tahunnya harus diimbangi oleh penambahan jumlah fasilitas, agar dapat memenuhi kebutuhan penduduk terhadap fasilitas. Identifikasi Kualitas dan Tingkat Pelayanan Fasilitas Sosial di Kawasan Perkotaan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi diperlukan untuk mengetahui kualitas dan tingkat pelayanan yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan skala perkotaan.

Seperti yang telah dipaparkan dalam latar belakang bahwa di dalam RTRW Kabupaten Sukabumi Perkotaan Palabuhanratu yang strategis yang merupakan simpul dari kecamatan yang ada di daerah sukabumi selatan, oleh karena itu sangat perlu adanya peningkatan fasilitas sosial yang mencirikan Perkotaan dengan fungsinya sebagai pusat pelayanan. Pada dasarnya fungsi Perkotaan terdiri atas dua fungsi dasar, yaitu sebagai pusat pelayanan terhadap penduduk seluruh Wilayah Selatan Kabupaten Sukabumi (fungsi primer) dan sebagai pusat pelayanan lokal terhadap penduduk perkotaan itu sendiri (fungsi komplementer).

Sesuai RTRW Propinsi Jawa Barat dan RTRW Kabupaten Sukabumi, Perkotaan Palabuhanratu meliputi PKNp dan PKW yaitu sebagai berikut :

Perkotaan Palabuhanratu, selain sebagai Ibukota Kabupaten Sukabumi juga sebagai pusat kegiatan permukiman, pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, perdagangan dan pariwisata.

Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kota/Kabupaten. Oleh karena itu perlu ditingkatkan pelayanannya dengan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai arahan bahwa kualitas dan tingkat pelayanan fasilitas sosial di Perkotaan Palabuhanratu sebagai Ibukota Kabupaten harus dapat melayani seluruh masyarakat di wilayahnya dan wilayah eksternalnya. Sehingga diperlukan Kajian Kualitas dan Tingkat Pelayanan Fasilitas Sosial Perkotaan Palabuhanratu untuk menjawab hal tersebut :

Bagaimana Kualitas fasilitas sosial di Kawasan Perkotaan Palabuhanratu.

Bagaimana Tingkat Pelayanan Fasilitas Sosial di Kawasan Perkotaan Palabuhanratu.

- Apakah kualitas dan tingkat pelayanan fasilitas sosial yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perdagangan di Perkotaan Palabuhanratu sudah memenuhi kualitas dan kebutuhan penduduk di wilayah tersebut dan interlanya ?
- Apakah penduduk Perkotaan Palabuhanratu sudah merasa terlayani dengan pelayanan fasilitas sosial yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perdagangan yang tersedia di wilayah tersebut ?

### **1.3 Tujuan dan Sasaran**

#### **1.3.1 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan ini adalah untuk mengidentifikasi kualitas dan tingkat pelayanan fasilitas sosial di Perkotaan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.

#### **1.3.2 Sasaran**

Sasaran yang harus di capai , yaitu sebagai berikut :

- Teridentifikasi ketersediaan eksisting fasilitas sosial meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perdagangan di Kawasan Perkotaan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Teranalisisnya tingkat pelayanan fasilitas sosial meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perdagangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimum di Kawasan Perkotaan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Teranalisisnya kondisi kualitas eksisting di Perkotaan Palabuhanratu kabupaten Sukabumi.

### **1.4 Ruang Lingkup Studi**

#### **1.4.1 Ruang Lingkup Substansi**

Dalam Ruang lingkup yang di kaji untuk mengevaluasi fasilitas sosial di Perkotaan Palabuhanratu Kabupaten Sukabuni , yaitu :

- Kajian identifikasi ketersediaan fasilitas sosial eksisting di Perkotaan Palabuhanratu atau Ibukota Kabupaten :
  - ✓ Fasilitas Pendidikan : TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi
  - ✓ Fasilitas Kesehatan : Rumah Sakit, Puskesmas, Apotik, Posyandu, dan Balai Pengobatan
  - ✓ Fasilitas Perdagangan : Pasar Tradisional, Pasar Modern, Mini Market dan Toko/Warung
- Kajian analisis tingkat pelayanan fasilitas sosial yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perdagangan di Kecamatan Palabuhanratu.

- Kajian analisis kualitas menurut persepsi masyarakat dengan melihat kuesioner hasil kepuasan masyarakat terhadap kualitas fasilitas sosial yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perdagangan yang telah ada di Perkotaan Palabuhanratu.
- Kajian kualitas dan tingkat pelayanan fasilitas sosial yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perdagangan di Perkotaan Palabuhanratu dengan membandingkan antara ketersediaan eksisiting, standar pelayanan dan kepuasan masyarakat.

#### **1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah**

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu wilayah yang ada di bagian selatan Provinsi Jawa Barat yang sebagian wilayahnya berada di pantai selatan. Kabupaten Sukabumi juga yang memiliki luas administrasi langsung dengan lautan, tepatnya Samudra Hindia. Adanya batas wilayah lautan ini menjadikan Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu wilayah pesisir yang memiliki wilayah antara daratan dan lautan atau terletak di sepanjang garis pantai Samudra Indonesia.

Kabupaten Sukabumi berada di wilayah Provinsi Jawa Barat dengan jarak tempuh 96 km dari Ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dan 119 km dari Ibukota Negara (Jakarta). Secara geografis wilayah Kabupaten Sukabumi terletak diantara 6°57' - 7°25' Lintang Selatan dan 106°49' -107°00' Bujur Timur dan mempunyai luas daerah 4.161 km<sup>2</sup> atau 11,21% dari luas Jawa Barat atau 3,01% dari luas Pulau Jawa, Secara administratif Kabupaten Sukabumi terdiri dari 47 kecamatan, , dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Timur : Kabupaten Cianjur
- Utara : Kabupaten Bogor
- Barat : Kabupaten Lebak
- Selatan : Samudra Hindia

Sedangkan untuk wilayah kajian yaitu Kawasan Perkotaan Palabuhanratu Secara administratif, wilayah Perkotaan Palabuhanratu dilingkupi oleh 2 (dua) buah wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Palabuhanratu dan Kecamatan Simpenan.

Apabila dilihat dari sejarah perkembangan kotanya, pada awalnya perkotaan Palabuhanratu hanya melingkupi wilayah Kelurahan Palabuhanratu yang kemudian berkembang meliputi 4 (empat) wilayah desa/kelurahan yaitu Kelurahan Palabuhanratu, Desa Citepus, Desa Citarik dan Desa Cidadap yang secara keruangan dirumuskan dalam RUTRK tahun 1996. Namun dengan seiringnya perkembangan sampai dengan saat ini, cakupan Perkotaan Palabuhanratu meliputi 6 (enam) wilayah desa/kelurahan yaitu menambahkan wilayah Desa Loji dimana penataan ruangnya telah dirumuskan dalam RDTRK pada tahun 2006/2007, namun pada saat ini Desa Citarik ada pemekaran menjadi Desa Citarik dan Desa Jayanti Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel I.1 berikut ini.

**Tabel I.1**  
**Desa/ Kelurahan Perkotaan Palabuhanratu**

No	Kelurahan
1	Citarik
2	Palabuhanratu
3	Citepus
4	Jayanti
5	Cidadap
6	Loji

Sumber: Kecamatan Dalam Angka 2016

Secara geografis, wilayah Perkotaan Palabuhanratu yang meliputi 6 desa/kelurahan tersebut terletak pada posisi sekitar antara 106o 31' BT sampai 106o 37' BT dan antara 6o 57' LS sampai 7o 04' terdiri dari 6 Desa/Kelurahan . dengan total luas wilayah sebesar 8.124,2 ha. Batasan administratif Perkotaan Palabuhanratu adalah sebagai berikut, untuk lebih jelasnya mengenai wilayah – wilayah desa/kelurahan yang terdapat di Perkotaan Palabuhanratu memiliki batasan – batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Cibodas dan Desa Buniwangi (Kec. Palabuhanratu)
- Sebelah Selatan : Desa Kertajaya dan Desa Cihaur (Kec. Simpenan)
- Sebelah Timur : Desa Cikadu, Desa Tonjong dan Desa Cibuntu (Kec. Palabuhanratu)
- Sebelah Barat : Teluk Palabuhanratu, Samudera Hindia

**Gambar 1.1 Peta Administrasi Perkotaan Palabuhanratu**

## **1.5 Metodologi Penelitian**

### **1.5.1 Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan untuk mengkaji kualitas dan tingkat pelayanan fasilitas sosial di Perkotaan Palabuhanratu yaitu Pendekatan kualitas dan tingkat pelayanan fasilitas dasar. Tingkat pelayanan fasilitas dasar adalah untuk memenuhi kebutuhan layanan kota/desa bagi wilayah kota/desa yang memerlukan dilihat dari sisi supply dan demand, dan mengarahkan perkembangan kota. Pendekatan kualitas dan tingkat pelayanan fasilitas dasar di Perkotaan Palabuhanratu atau Ibukota Kabupaten dilakukan dengan cara:

- 1) Mengukur tingkat pelayanan fasilitas sosial di Perkotaan Palabuhanratu sebagai pusat pelayanan terhadap wilayah sekitarnya.
- 2) Mengukur kapasitas pelayanan berdasarkan persyaratan fasilitas pelayanan dasar mengacu pada standard yang ada yaitu standard mengenai petunjuk perencanaan kawasan perumahan kota dan berpedoman pada standard yang dikeluarkan dari kimpraswil (SK Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 dan SNI 03-1733-2004 ) untuk memperoleh kualitas dan tingkat pelayanan yang optimal dari segi supply dan demand. Data-data yang dibutuhkan jumlah penduduk dan jumlah fasilitas yang ada di wilayah studi .

### **1.5.2 Metode Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan data dilakukan melalui berbagai Teknik yaitu :

#### **a. Pengumpulan Data Sekunder**

Yaitu melakukan pengumpulan referensi yang berhubungan dengan topik studi, diperoleh dari buku-buku serta hasil penelitian-penelitian sebagai landasan teori dan bahan perbandingan. serta data-data yang diperoleh dari Dinas/Instansi pemerintahan terkait.

#### **b. Pengumpulan Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

- Observasi lapangan, yaitu dengan cara mengamati langsung kondisi fasilitas sosial di Kecamatan Palabuhanratu sebagai Ibukota Kabupaten
- Dokumentasi, yaitu dibuat untuk mendapatkan kondisi eksisting fasilitas sosial di Kecamatan Palabuhanratu sebagai Ibukota Kabupaten secara visual.

### **1.5.3 Metode Analisis**

Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini digunakan metoda analisis kuantitatif dan kualitatif yang dianggap memiliki kesesuaian dengan penelitian ini, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan yang ada.

#### **A. Metode Kuantitatif**

Metode kuantitatif merupakan metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena sosial. Untuk dapat melakukan pengukuran, setiap fenomena sosial di jabarkan kedalam beberapa komponen masalah, variable dan indikator.

Analisis yang digunakan pada metode ini yaitu analisis tingkat pelayanan fasilitas sosial. Hasil analisis tingkat pelayanan mengacu pada standard yang ada yaitu standard mengenai petunjuk perencanaan kawasan perumahan kota dan berpedoman pada standard yang dikeluarkan dari kimpraswil (SK Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 dan SNI 03-1733-2004 ) dengan didasarkan pada jumlah penduduk pendukung.

Analisis tingkat pelayanan fasilitas sosial di Perkotaan Palabuhanratu dilakukan berdasarkan Standar Pelayanan Minimum, selain itu juga dilakukan dengan cara melihat perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah penduduk pendukung untuk melihat jumlah fasilitas yang seharusnya ada di wilayah tersebut, dimana fasilitas sosial tersebut, yaitu :

- Fasilitas Pendidikan
- Fasilitas Kesehatan
- Fasilitas Perdagangan

Dalam analisis penentuan jumlah dan fasilitas ini, mengacu pada standard yang ada yaitu standard mengenai petunjuk perencanaan kawasan perumahan kota dan berpedoman pada standard yang dikeluarkan dari kimpraswil (SK Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 dan SNI 03-1733-2004 ) dengan didasarkan pada jumlah penduduk pendukung. Adapun perhitungan yang digunakan adalah:

$$\text{Jumlah yang seharusnya} = \frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Standar Penduduk Pendukung}}$$

$$\text{Tingkat Pelayanan} = \frac{\text{Jumlah Yang Ada}}{\text{Jumlah Yang Seharusnya}} \times 100\%$$

## B. Metode Kualitatif

Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, cermat dan akurat mengenai fenomena sosial tertentu berupa fakta-fakta, keadaan, sifat-sifat suatu individu atau kelompok serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Analisis kualitas fasilitas sosial yaitu dengan cara penyebaran kuesioner kepada masyarakat di Perkotaan Palabuhanratu. Penyebaran kuisisioner ini dilakukan unuk mengetahui lebih jelas tentang kualitas dan pelayanan fasilitas sosial terhadap masyarakat, Bagaimana kualitas fasilitas sosial menurut masyarakat mengenai fasilitas sosial yang telah disediakan.

Kajian Kualitas dan Tingkat Pelayanan Fasilitas Sosial di Perkotaan Palabuhanratu dilakukan dengan membandingkan antara :

- ketersediaan eksisiting (jumlah fasilitas yang ada) dengan melihat tingkat pelayanan pada setiap fasilitas sosial
- standar pelayanan minimum yaitu, standard mengenai petunjuk perencanaan kawasan perumahan kota dan berpedoman pada standard yang dikeluarkan dari

kimpraswil (SK Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 dan SNI 03-1733-2004 )

- Mengukur Kualitas menurut masyarakat yang dihasilkan dari kuesioner untuk mengetahui masyarakat bisa memberikan respon dengan adanya kualitas dan tingkat pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah, sehingga akan diperoleh frekuensi kecenderungan masyarakat mengenai kualitas dan tingkat pelayanan fasilitas sosial tersebut.

Sehingga dapat dikaji apakah fasilitas sosial yang sudah disediakan oleh pemerintah sudah dapat melayani dan kualitasnya menurut masyarakat di Perkotaan Palabuhanratu apa sebaliknya yaitu dengan melihat menurut masyarakat terhadap kualitas dan pelayanan fasilitas sosial tersebut.

- Penentuan sampel

Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel (contoh) yang benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh, atau dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Berdasarkan pendapat tersebut maka peneliti menggunakan teknik purposive random sampling. Purposive random sampling adalah penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008: 85). Artinya digunakannya teknik purposive random sampling karena penelitian sudah menetapkan terlebih dahulu sampel yang akan dipakai untuk penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yaitu keefektifan layanan bimbingan kelompok dalam meningkatkan motivasi berprestasi siswa.

Dalam penelitian ini sampel cukup besar dan sifat populasinya relatif homogen. Dengan teknik ini, maka populasi diberi kesempatan menjadi anggota sampel, sehingga pengambilan sampel dapat representatif. Teknik ini dilakukan karena beberapa pertimbangan, yaitu keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh.

Untuk penyebaran kuesioner diambil beberapa sampel dalam penyebaran kuesioner ini, pengambilan sampel didasarkan pada rumus dari Slovin (1993),

$$n = \frac{N}{(1 + N(e^2))}$$

Dimana: n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = nilai kritis (persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel sebesar 10% = 0,1)

Tingkat Kepercayaan bila dilihat dengan nilai kritis sebesar 10% maka nilai tingkat kepercayaan sebesar 90%

## B. Faktor Variabel

**Tabel I.2**  
**Faktor Variabel**

No	Variabel	Indikator	Parameter	Sumber
<b>A</b>	<b>Fasilitas Pendidikan</b>			
<b>1</b>	<b>TK,SD,SMP,SMA,PT</b>	Ketersediaan Fasilitas	Jumlah fasilitas (unit)	SK Menteri Permukiman dan prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 dan SNI 03-1733-2004
		Lokasi Fasilitas	Didalam/diluar lingkungan tempat tinggal	SNI 03-1733-2004
		Kondisi Bangunan	Baik/buruk	Teori
		Jarak Tempuh	Jauh/dekat	SNI 03-1733-2004
		Jangkauan Pelayanan	Kemudahan (akseibilitas)	SNI 03-1733-2004
<b>B</b>	<b>Fasilitas Kesehatan</b>			
<b>2</b>	<b>RS,Puskesmas,Balai Pengobatan,Apotik,Posyandu</b>	Ketersediaan Fasilitas	Jumlah fasilitas (unit)	SK Menteri Permukiman dan prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 dan SNI 03-1733-2004

No	Variabel	Indikator	Parameter	Sumber
		Lokasi Fasilitas	Didalam/diluar lingkungan tempat tinggal	SNI 03-1733-2004
		Kondisi Bangunan	Baik/buruk	Teori
		Jarak Tempuh	Jauh/dekat	SNI 03-1733-2004
		Jangkauan Pelayanan	Kemudahan (aksebilitas)	SNI 03-1733-2004
<b>C</b>	<b>Fasilitas Perdagangan</b>			
<b>3</b>	<b>Pasar Tradisional,Pasar Modern,Mini Market,Toko/Warung,</b>	Ketersediaan Fasilitas	Jumlah fasilitas (unit)	SK Menteri Permukiman dan prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 dan SNI 03-1733-2004
		Lokasi Fasilitas	Didalam/diluar lingkungan tempat tinggal	SNI 03-1733-2004
		Kondisi Bangunan	Baik/buruk	Teori
		Jarak Tempuh	Jauh/dekat	SNI 03-1733-2004
		Jangkauan Pelayanan	Kemudahan (aksebilitas)	SNI 03-1733-2004

Sumber : SK Menteri Permukiman dan prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 dan SNI 03-1733-2004

## 1.6 Batasan Studi

Jika dilihat dari permasalahan fasilitas sosial di Perkotaan Palabuhanratu maka cukup luas dan cukup banyak lingkupnya jika diteliti secara menyeluruh dalam penelitian Tugas Akhir ini. Dengan melihat tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi kualitas dan tingkat pelayanan fasilitas sosial Perkotaan Palabuhanratu, sehingga analisis yang dikaji yaitu hanya melihat kualitas dan tingkat pelayanan berdasarkan kondisi fasilitas sosial di Perkotaan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.

Adapun pembagian jenis fasilitas sosial yaitu dengan melihat fungsi kegiatan di Perkotaan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi yaitu sebagai pusat permukiman, pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, perdagangan dan pariwisata sehingga fasilitas sosial yang menjadi kajiannya pun yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perdagangan. Untuk jenis-jenis fasilitas sosial ditentukan SNI 03-1733-2004, sehingga dibatasi menjadi:

- Fasilitas Pendidikan : TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi
- Fasilitas Kesehatan :Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas,Balai Pengobatan, Apotek.
- Fasilitas Perdagangan :Pasar Tradisional, Pasar Modern, Mini Market,Toko/Warung.

### 1.7 Kerangka Berfikir

Dalam suatu penelitian dibutuhkan kerangka berpikir, adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

**Gambar 1.2**  
**Kerangka Pikir**

